

GINI RATIO

Analisis Ketimpangan Distribusi
Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: GINI RATIO - Analisis Ketimpangan Distribusi
Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi*

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Rector, Cenderawasih State University, Papua (1978-1988)

Rector, Krida Wacana Christian University, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

Data Analyst, Concurrently Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta

© RUDYCT-e-Academic-Series

rudyclt75@gmail.com

Bogor, Indonesia

30 October 2025



GINI RATIO:

Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi

1. Pendahuluan: Mengapa Ketimpangan Perlu Diukur

Dalam studi ekonomi pembangunan, kesejahteraan suatu bangsa tidak hanya diukur dari besarnya **produk domestik bruto (PDB)**, tetapi juga dari **bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan** di antara penduduknya. Dua negara dapat memiliki tingkat pendapatan rata-rata yang sama, tetapi satu mungkin menghadapi ketimpangan sosial yang lebih besar akibat distribusi pendapatan yang timpang.

Untuk menjawab tantangan itu, para ekonom mengembangkan **alat ukur ketimpangan**, di antaranya **Kurva Lorenz** dan **Koefisien Gini (GINI Ratio)**. GINI Ratio berfungsi sebagai ukuran **numerik** yang menggambarkan **tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan** dalam suatu populasi.

Ketimpangan yang tinggi seringkali dikaitkan dengan berbagai konsekuensi sosial: meningkatnya kemiskinan relatif, ketidakstabilan politik, rendahnya mobilitas sosial, hingga menurunnya kepercayaan terhadap institusi ekonomi. Oleh karena itu, GINI Ratio menjadi indikator penting dalam kebijakan publik, perencanaan pembangunan, serta analisis kesejahteraan ekonomi.

2. Konsep Dasar GINI Ratio

2.1. Definisi Formal

GINI Ratio, yang diperkenalkan oleh **Corrado Gini (1912)**, adalah angka yang mengukur derajat ketimpangan dalam distribusi pendapatan suatu populasi.

Nilainya berkisar antara **0 hingga 1**, atau kadang dikalikan 100 untuk menghasilkan nilai **0–100**.

- **Nilai 0** berarti **distribusi sempurna (perfect equality)**, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama.
- **Nilai 1** berarti **ketimpangan sempurna (perfect inequality)**, di mana seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu atau kelompok kecil saja.

Secara konseptual, GINI Ratio mengukur **luas area antara Kurva Lorenz dan garis kesetaraan sempurna** dibandingkan dengan **luas area di bawah garis kesetaraan sempurna**.

2.2. Rumus Matematis

Rumus dasar GINI Ratio:

$$G = \frac{A}{A + B}$$

di mana:

- **A** = area antara garis kesetaraan sempurna dan Kurva Lorenz
- **B** = area di bawah Kurva Lorenz

Rumus lain yang umum digunakan:

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp$$

dengan $L(p)$ adalah fungsi Kurva Lorenz, yaitu proporsi kumulatif pendapatan terhadap proporsi kumulatif populasi.

Dalam bentuk diskret, untuk data N individu atau kelompok:

$$G = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |x_i - x_j|}{2N^2 \bar{x}}$$

di mana x_i adalah pendapatan individu ke- i dan $\bar{x}$ adalah pendapatan rata-rata.

3. Hubungan antara Kurva Lorenz dan GINI Ratio

3.1. Kurva Lorenz sebagai Representasi Visual

Kurva Lorenz adalah grafik yang menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan dalam suatu populasi.

- **Sumbu X:** Persentase kumulatif populasi (dari yang termiskin ke terkaya).
- **Sumbu Y:** Persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh populasi tersebut.

Garis diagonal 45° menunjukkan **kesetaraan sempurna**, di mana misalnya 20% penduduk termiskin menerima 20% pendapatan total. Semakin melengkung Kurva Lorenz menjauh dari garis diagonal tersebut, semakin besar ketimpangan yang terjadi.

3.2. GINI Ratio sebagai Turunan Numerik

GINI Ratio pada dasarnya mengkuantifikasi **kelengkungan Kurva Lorenz**.

Jika Kurva Lorenz semakin menjauh dari garis diagonal, area “A” menjadi lebih besar, sehingga **GINI Ratio meningkat**.

Sebagai contoh:

- Negara A memiliki Kurva Lorenz yang hampir menempel pada garis diagonal $\rightarrow$ GINI $\approx$ 0,25 (relatif egaliter).
- Negara B memiliki Kurva Lorenz yang jauh melengkung $\rightarrow$ GINI $\approx$ 0,55 (ketimpangan tinggi).

4. Interpretasi Nilai GINI Ratio

GINI Ratio digunakan untuk **menilai tingkat kesetaraan ekonomi** dalam suatu negara atau wilayah.

Interpretasi umum:

Nilai GINI Kategori Ketimpangan

0,00 – 0,20 Sangat Rendah (sangat egaliter)

0,21 – 0,30 Rendah

0,31 – 0,40 Sedang

0,41 – 0,50 Tinggi

> 0,50 Sangat Tinggi

Namun, batas-batas ini bersifat kontekstual. Negara berkembang cenderung memiliki GINI di atas 0,40, sedangkan negara-negara Nordik sering di bawah 0,30.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi GINI Ratio

1. **Struktur Ekonomi** – Ketergantungan pada sektor padat modal (seperti pertambangan) sering memperlebar kesenjangan.
2. **Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan** – Ketimpangan akses menimbulkan disparitas produktivitas.

3. **Kebijakan Pajak dan Transfer Sosial** – Negara dengan redistribusi pajak progresif cenderung memiliki GINI yang lebih rendah.
 4. **Urbanisasi dan Modernisasi** – Perpindahan dari pedesaan ke kota dapat meningkatkan GINI jika tidak disertai pemerataan kesempatan.
 5. **Teknologi dan Otomatisasi** – Revolusi digital memperbesar jarak antara pekerja berkemampuan tinggi dan rendah.
 6. **Kesenjangan Gender dan Wilayah** – Ketimpangan gender dalam kesempatan kerja serta disparitas antarprovinsi (misal Jawa vs luar Jawa di Indonesia).
-

6. GINI Ratio dalam Perspektif Global

Secara global, tren GINI Ratio menunjukkan pola menarik:

- **Negara Nordik (Swedia, Norwegia, Finlandia):** GINI sekitar 0,25–0,30, mencerminkan distribusi yang sangat merata.
- **Amerika Serikat:** GINI sekitar 0,41–0,45, akibat konsentrasi kekayaan di kalangan 1% populasi terkaya.
- **Negara-negara berkembang (Brasil, Afrika Selatan, Indonesia):** GINI di atas 0,40, dengan variasi tergantung kebijakan sosial dan redistribusi.

Fenomena **globalisasi dan otomatisasi** memperparah ketimpangan di banyak negara, meskipun secara absolut pendapatan meningkat. Hal ini menimbulkan paradoks “pertumbuhan tanpa pemerataan” (growth without equity).

7. GINI Ratio di Indonesia

7.1. Tren Historis

Menurut data **Badan Pusat Statistik (BPS):**

- Tahun 1999–2005: GINI sekitar 0,32–0,34 (masih moderat).
- 2011–2015: naik ke 0,41, menandai ketimpangan tertinggi dua dekade terakhir.
- 2016–2023: menurun perlahan ke sekitar 0,38, akibat program sosial (PKH, BPNT, dan subsidi UMKM).
- 2024–2025 (estimasi): sekitar **0,37–0,38**, masih dalam kategori sedang–tinggi.

7.2. Faktor Ketimpangan di Indonesia

1. **Perbedaan wilayah** — ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa tetap tinggi.
2. **Sektor pekerjaan** — dominasi sektor informal menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata.
3. **Pendidikan** — disparitas kualitas pendidikan antarwilayah memperkuat ketimpangan produktivitas.
4. **Urbanisasi** — peningkatan pendapatan perkotaan tidak selalu menetes ke daerah pedesaan (trickle-down effect lemah).
5. **Digitalisasi ekonomi** — hanya sebagian kecil tenaga kerja yang mampu memanfaatkan teknologi baru.

7.3. Kebijakan Pengurang Ketimpangan

- **Pajak progresif dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).**
- **Program jaminan sosial (BPJS, Kartu Prakerja).**
- **Pemberdayaan UMKM dan koperasi digital.**
- **Pembangunan infrastruktur daerah tertinggal (Tol Laut, Desa Digital, dan Dana Desa).**

8. Kritik terhadap GINI Ratio

Walaupun populer, GINI Ratio tidak luput dari keterbatasan:

1. **Tidak menunjukkan sumber ketimpangan.**
GINI hanya mengukur hasil akhir, bukan penyebab seperti gender, wilayah, atau usia.
2. **Sensitif terhadap perubahan di kelas menengah.**
GINI dapat tetap sama meski terjadi pergeseran besar di ekstrem kaya atau miskin.
3. **Tidak menangkap dimensi non-pendapatan.**
Misalnya, ketimpangan dalam kesehatan, pendidikan, atau akses teknologi tidak tercermin.
4. **Tidak bersifat aditif antarwilayah.**
GINI nasional tidak dapat diperoleh dengan rata-rata GINI antarprovinsi secara langsung.

Untuk itu, beberapa ekonom menggunakan **ukuran pelengkap** seperti:

- **Theil Index**
- **Atkinson Index**
- **Palma Ratio** (rasio pendapatan 10% terkaya terhadap 40% termiskin)

9. Studi Kasus: Ketimpangan di Indonesia dan Negara ASEAN

9.1. Indonesia

GINI 0,38 – cenderung menurun sejak 2015, namun masih tinggi di provinsi seperti DKI Jakarta, Papua, dan Bali.

Faktor utama: ketimpangan pendidikan, produktivitas, dan digital divide.

9.2. Thailand

GINI 0,43 – ketimpangan tinggi akibat konsentrasi industri di Bangkok dan daerah metropolitan.

9.3. Vietnam

GINI 0,35 – relatif rendah karena reformasi agraria dan kebijakan redistribusi.

9.4. Singapura

GINI 0,39 (setelah pajak dan subsidi). Sebelum pajak bisa mencapai 0,46.

Menunjukkan pentingnya kebijakan redistributif negara maju.

10. Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Ketimpangan

Ketimpangan yang tinggi berimplikasi luas:

1. **Menurunnya mobilitas sosial.** Generasi muda sulit meningkatkan status ekonomi.
2. **Meningkatnya ketidakpuasan sosial dan politik.**
3. **Melemahkan pertumbuhan jangka panjang.** Konsumsi menurun karena daya beli mayoritas rendah.
4. **Meningkatnya kriminalitas dan ketidakstabilan sosial.**
5. **Menghambat inovasi.** Jika akses pendidikan dan modal terkonsentrasi, kreativitas tidak tersebar luas.

Ekonom Thomas Piketty (2014) menunjukkan bahwa jika tingkat pengembalian modal (r) lebih besar dari pertumbuhan ekonomi (g), maka ketimpangan akan terus meningkat — fenomena yang disebut **$r > g$ trap**.

11. Strategi Menurunkan Ketimpangan GINI

Beberapa strategi jangka panjang:

1. **Pendidikan inklusif dan peningkatan keterampilan (reskilling & upskilling).**
2. **Kebijakan pajak progresif dan redistribusi pendapatan.**
3. **Pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM digital.**

4. **Infrastruktur sosial (transportasi, internet, kesehatan).**
 5. **Transformasi ekonomi hijau dan biru** untuk pemerataan sumber daya alam.
 6. **Kolaborasi publik-swasta (PPP)** dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas.
 7. **Ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).**
-

12. Refleksi: GINI Ratio dan Moral Ekonomi

GINI Ratio bukan sekadar angka, tetapi **cermin moralitas ekonomi bangsa**.

Tingginya ketimpangan sering kali menandakan lemahnya komitmen sosial terhadap keadilan distributif.

Dalam konteks Indonesia, pengurangan ketimpangan bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari **nilai-nilai Pancasila** — terutama sila ke-5: *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

13. Kesimpulan

GINI Ratio adalah indikator penting yang:

- Mengukur **tingkat ketimpangan pendapatan atau kekayaan** dalam masyarakat.
- Menjadi alat diagnostik untuk **menilai keberhasilan kebijakan sosial-ekonomi**.
- Menjadi refleksi atas **nilai keadilan sosial dan inklusivitas ekonomi**.

Namun, penggunaannya harus dikombinasikan dengan indikator lain seperti **Theil Index, Palma Ratio**, serta indikator multidimensi seperti **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**.

Tujuan akhirnya bukan sekadar menurunkan GINI Ratio, tetapi **membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing**, di

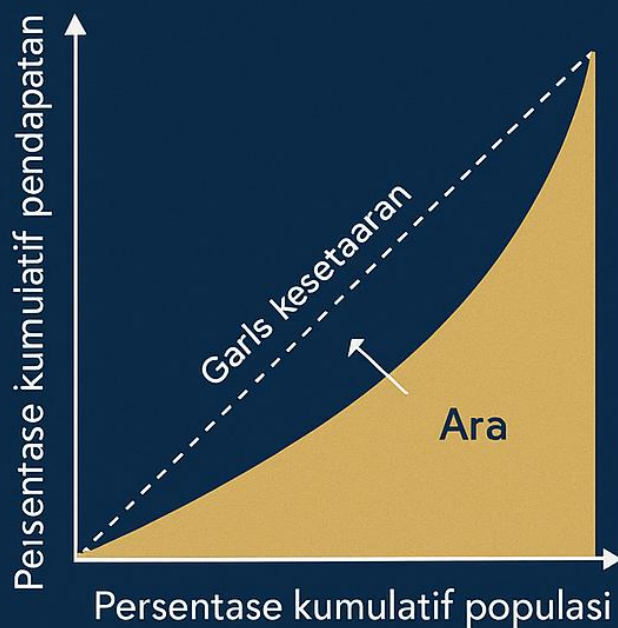
mana setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkontribusi.



GLOSARIUM

GINI RATIO

Ukuran untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.



$$G = \frac{A}{A+B}$$

Interpretasi

- 0 menunjukkan pemerataan sempurna
- 1 menunjukkan ketimpangan sempurna
- 0,5 ketimpangan yang tinggi

Interpretasi

0 menunjukkan pemerataan sempurna
1 menunjukkan ketimpangan sempurna
0,5 ketimpangan yang tinggi



DISKUSI DAN REFLEKSI:

Ketimpangan Ekonomi Indonesia dalam Cermin GINI Ratio

(RudyCT Academic Series 2025)

1. Pendahuluan: Ketimpangan sebagai Cermin Moral Pembangunan

Dalam visi pembangunan nasional Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi target utama. Namun, pertumbuhan tanpa pemerataan menghasilkan **paradoks kemakmuran**—yakni ekonomi yang tumbuh tetapi kesenjangan sosial semakin melebar.

Indikator paling sederhana dari paradoks ini adalah **GINI Ratio**, yang menunjukkan seberapa besar jurang antara kelompok kaya dan miskin.

Indonesia dengan GINI sekitar **0,37–0,39 (BPS, 2024)** menempati posisi “menengah ke atas” dalam ketimpangan di Asia Tenggara—lebih timpang dibanding Vietnam, namun sedikit lebih baik daripada Thailand atau Filipina.

Angka ini menjadi cermin bahwa **kue ekonomi nasional belum terbagi secara adil**, dan pertumbuhan belum cukup *inklusif*.

2. Ketimpangan Struktural: Akar Masalah dalam Sistem Ekonomi

2.1. Ketimpangan Wilayah (Regional Inequality)

Indonesia masih menghadapi **dualitas ekonomi geografis**:

- **Pulau Jawa** menghasilkan lebih dari 58% PDB nasional,
- sementara wilayah luar Jawa (Kalimantan, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) tertinggal dari sisi infrastruktur, pendidikan, dan industrialisasi.

Ketimpangan spasial ini bersumber dari **konsentrasi investasi dan industri di wilayah urban**, khususnya Jabodetabek dan Jawa Timur.

Pemerintah berusaha menanggapi dengan proyek **Tol Laut, Kawasan Industri Baru, Ibu Kota Nusantara (IKN)**, serta **Dana Desa**, namun efeknya masih terbatas terhadap redistribusi ekonomi yang mendalam.

2.2. Ketimpangan Sektor

Sektor formal (perbankan, telekomunikasi, manufaktur) tumbuh pesat dengan produktivitas tinggi, sedangkan sektor informal (pertanian, perdagangan kecil, jasa tradisional) masih menjadi tempat bergantung bagi sekitar **58% tenaga kerja**.

Pekerja informal tidak memiliki jaminan sosial, upah minimum, atau akses pelatihan, menyebabkan *income gap* yang melebar antar sektor.

2.3. Ketimpangan Akses Pendidikan dan Digitalisasi

Transformasi digital Indonesia mempercepat ekonomi berbasis teknologi, namun juga menciptakan **digital divide**.

Hanya sekitar 30% pekerja yang memiliki literasi digital memadai untuk beradaptasi dengan sistem ekonomi baru berbasis AI, e-commerce, dan data analytics.

Akibatnya, keuntungan ekonomi digital lebih banyak dinikmati oleh kelompok urban berpendidikan tinggi.

3. GINI Ratio dan Dimensi Sosial: Dari Statistik ke Realitas

GINI Ratio sejatinya lebih dari sekadar angka statistik—ia adalah **refleksi sosial tentang rasa keadilan dan kesempatan**.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan terasa di berbagai aspek kehidupan:

1. Perumahan dan Urbanisasi.

Di kota besar seperti Jakarta, muncul jurang yang nyata antara perumahan mewah dan kawasan padat miskin.

GINI di perkotaan mencapai $>0,40$, sedangkan di pedesaan sekitar $0,31$.

2. Pendidikan.

Sekolah unggulan terkonsentrasi di kota besar. Perguruan tinggi

terkemuka masih didominasi oleh keluarga kelas menengah ke atas.

3. Kesehatan dan Gizi.

Akses ke layanan kesehatan modern masih timpang; kemiskinan anak (stunting) di daerah timur Indonesia mencapai lebih dari 30%.

4. Ketimpangan Gender dan Generasi.

Partisipasi kerja perempuan hanya sekitar 54%, jauh di bawah laki-laki.

Sementara itu, generasi muda menghadapi **ketimpangan antargenerasi**, di mana akses terhadap lahan, modal, dan pekerjaan formal semakin sulit.

4. Ketimpangan dan Risiko Sosial-Ekonomi

Ketimpangan ekonomi yang tinggi memiliki implikasi serius:

- **Erosi kepercayaan sosial.**
Ketimpangan memunculkan rasa ketidakadilan dan mengurangi kohesi sosial.
Dalam masyarakat yang timpang, solidaritas melemah karena jurang ekonomi membelah kelompok sosial.
- **Ketidakstabilan politik dan sosial.**
Ketimpangan dapat memperbesar potensi polarisasi politik, populisme ekonomi, dan konflik kelas.
- **Pertumbuhan tanpa pemerataan (growth without equity).**
Dalam jangka panjang, ketimpangan dapat menekan konsumsi domestik—karena daya beli mayoritas penduduk rendah—sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan.

Ekonom Joseph Stiglitz menyebut fenomena ini sebagai “**The Inequality Trap**”, di mana ketimpangan menciptakan sistem yang memperkuat dirinya sendiri: kelompok kaya menguasai sumber daya politik dan ekonomi, yang kemudian memperkokoh privilese mereka.

5. Pandemi COVID-19 dan “Double Inequality”

Pandemi COVID-19 memperburuk ketimpangan:

- Pekerja sektor informal kehilangan penghasilan.
- Usaha kecil banyak yang gulung tikar.
- Sebaliknya, sektor teknologi dan finansial digital justru tumbuh pesat.

Fenomena ini menciptakan **double inequality** — antara kelompok kaya–miskin dan antara sektor digital–non-digital.

GINI Ratio sempat naik pada 2020–2021 sebelum menurun kembali pada 2022 seiring program **bantuan sosial (Bansos), Kartu Prakerja,** dan **UMKM go digital.**

6. Upaya Pemerintah: Menuju Pembangunan yang Inklusif

Berbagai strategi telah dijalankan untuk menurunkan GINI Ratio:

1. Kebijakan fiskal dan transfer sosial.

- Bantuan langsung tunai (BLT), PKH, subsidi pangan dan energi.
- Pajak progresif serta cukai pada kelompok pendapatan tinggi.

2. Desentralisasi fiskal.

Melalui **Dana Desa dan Dana Alokasi Umum (DAU)**, daerah memiliki kemampuan untuk memperbaiki layanan dasar dan infrastruktur.

3. Program pemberdayaan ekonomi lokal.

Misalnya *One Village One Product (OVOP)*, KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan penguatan koperasi digital.

4. Infrastruktur dan konektivitas.

Pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan meningkatkan akses pasar bagi daerah tertinggal.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini seringkali terhambat oleh **ketidaktepatan sasaran, birokrasi lambat, dan kesenjangan kapasitas daerah.**

Redistribusi pendapatan belum sepenuhnya diikuti redistribusi **peluang dan kapabilitas manusia.**

7. Tantangan Baru: Ketimpangan di Era AI dan Ekonomi Digital

Kehadiran **kecerdasan buatan (AI)** dan otomasi membawa tantangan baru bagi kesetaraan ekonomi:

- Pekerjaan rutin menurun,
- Pekerjaan berbasis pengetahuan meningkat,
- Ketimpangan keterampilan (skill inequality) membesar.

Jika tidak diimbangi dengan **pendidikan adaptif dan pelatihan berbasis teknologi**, maka **GINI Ratio akan meningkat kembali** dalam dekade mendatang.

Masalah ini bukan hanya ekonomi, tetapi **etika sosial**: bagaimana Indonesia memastikan bahwa teknologi menjadi alat pemberdayaan, bukan penyingkiran.

8. Refleksi Filosofis: GINI sebagai Indikator Moral Bangsa

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan bukan sekadar tantangan teknis, tetapi **tantangan moral dan filosofis.**

Pancasila dan UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan pembangunan adalah **“mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”**

Namun realitas GINI Ratio menunjukkan bahwa:

Kemajuan ekonomi belum otomatis berarti kemajuan sosial.

Dari perspektif etika pembangunan, GINI Ratio mengingatkan kita akan tiga hal:

1. **Keadilan distributif (distributive justice)** — bahwa setiap warga berhak atas bagian yang layak dari hasil pembangunan.
2. **Solidaritas sosial (social cohesion)** — bahwa kemajuan sejati menuntut keterlibatan kolektif, bukan hanya kompetisi.
3. **Kemandirian berkeadilan (equitable empowerment)** — bahwa kebebasan ekonomi harus dibarengi tanggung jawab sosial.

9. Refleksi Kebijakan: Dari Pertumbuhan Menuju Keadilan

Untuk mengubah arah pembangunan, Indonesia perlu mengadopsi paradigma “**Growth with Equity**” — pertumbuhan yang tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

Refleksi kebijakan meliputi:

1. **Pendidikan adaptif sepanjang hayat.**
Pendidikan harus menyiapkan warga menghadapi ekonomi digital dan AI, bukan hanya mengisi lapangan kerja tradisional.
2. **Ekonomi berbasis komunitas dan solidaritas.**
Pemberdayaan UMKM dan koperasi digital harus menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi.
3. **Pajak kekayaan dan redistribusi aset.**
Reformasi pajak perlu diarahkan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan ekstrem.
4. **Pembangunan daerah berbasis potensi lokal.**
Mengangkat sektor unggulan daerah — pertanian organik, pariwisata berkelanjutan, ekonomi biru, dan energi hijau.
5. **Transformasi menuju ekonomi kesejahteraan (well-being economy).**
Ukuran pembangunan bukan lagi PDB, melainkan kesejahteraan manusia, kualitas hidup, dan kebahagiaan sosial.

10. Kesimpulan: Menuju Moral Arc of Economic Equality

Dalam bahasa reflektif, GINI Ratio adalah “**cermin nurani ekonomi**”: angka yang menegur bangsa ketika sebagian rakyat tertinggal dalam kemiskinan di tengah gemerlap pembangunan.

Menurunkan GINI berarti menegakkan keadilan sosial; membangun ekonomi inklusif berarti membangun *iman kemanusiaan dalam tindakan*.

The Moral Arc of Economic Equality:

From Growth → Distribution → Inclusion → Justice → Sustainability.

Arc ini menggambarkan perjalanan moral bangsa menuju kesejahteraan bersama.

Pertumbuhan ekonomi hanyalah awal; keadilan sosial adalah tujuan akhir.

Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud jika kemakmuran tidak menjadi milik segelintir, tetapi menjadi **berkat bersama bagi seluruh rakyat Indonesia**.

INEQUALITY IN INDONESIA 2025

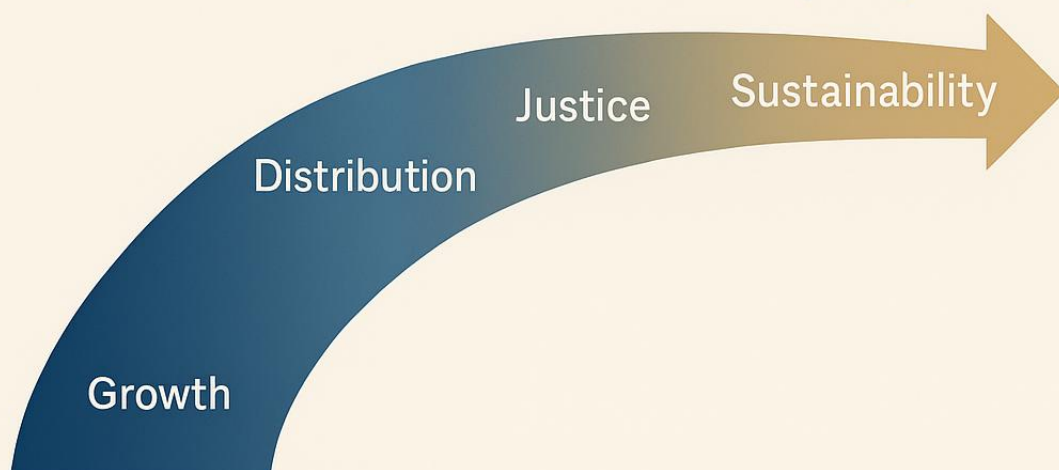
Between Growth and Social Justice



Inequality Issues

- **Spatial Inequality** – Investment concentrating in Java
- **Sectoral Inequality** – Income disparities between formal and informal workers
- **Access Inequality** – Unequal opportunities in education and digital access
- **Social Risk** – Weakening social cohesion and instability

The Moral Arc of Economic Equality





GLOSARIUM

Istilah	Definisi Akademik
GINI Ratio (Koefisien Gini)	Ukuran statistik untuk menilai ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilainya berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).
Kurva Lorenz	Representasi grafis dari distribusi pendapatan; menunjukkan proporsi kumulatif pendapatan terhadap proporsi kumulatif populasi.
Ketimpangan Ekonomi	Kondisi di mana pendapatan, kekayaan, atau kesempatan ekonomi tidak terbagi secara merata di antara anggota masyarakat.
Kesetaraan Ekonomi (Economic Equality)	Situasi ketika setiap individu dalam masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, dan hasil ekonomi.
Distribusi Pendapatan	Cara pendapatan nasional dibagi di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.
Disparitas Wilayah (Regional Disparity)	Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu negara.
Redistribusi Pendapatan (Income Redistribution)	Kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan melalui pajak progresif, subsidi, atau program sosial.
Pajak Progresif	Sistem perpajakan di mana tarif pajak meningkat seiring bertambahnya tingkat pendapatan.

*Rudy C Tarumingkeng: GINI RATIO - Analisis Ketimpangan Distribusi
Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi*

Istilah	Definisi Akademik
Keadilan Distributif (Distributive Justice)	Prinsip moral yang menekankan pembagian sumber daya dan hasil pembangunan secara adil sesuai kebutuhan atau kontribusi.
Trickle-down Effect	Teori bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok kaya akan menetes (trickle down) kepada kelompok miskin melalui efek multiplikasi ekonomi.
Digital Divide (Kesenjangan Digital)	Kesenjangan akses dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital antarindividu atau wilayah.
Theil Index	Ukuran ketimpangan berbasis teori informasi yang memperhitungkan variasi antar dan dalam kelompok populasi.
Palma Ratio	Rasio pendapatan 10% kelompok terkaya dibandingkan dengan 40% kelompok termiskin dalam suatu negara.
Atkinson Index	Ukuran ketimpangan yang memberi bobot lebih pada perubahan pendapatan di kelompok miskin.
Kesejahteraan Ekonomi (Economic Welfare)	Kondisi ketika individu atau masyarakat mencapai standar hidup yang memadai melalui pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial.
Inclusive Growth	Pertumbuhan ekonomi yang merata dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin.
Sektor Formal dan Informal	Sektor formal mencakup pekerjaan dengan kontrak dan perlindungan hukum; sektor

Istilah	Definisi Akademik
	informal mencakup pekerjaan tanpa jaminan sosial dan upah tetap.
Social Cohesion (Koheksi Sosial)	Tingkat keterikatan sosial dalam masyarakat yang mencerminkan kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama antarkelompok.
Well-being Economy	Konsep ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sosial, bukan semata-mata pertumbuhan PDB.
$r > g$ (Piketty's Inequality Law)	Prinsip Thomas Piketty: ketika tingkat pengembalian modal (r) lebih besar dari pertumbuhan ekonomi (g), ketimpangan cenderung meningkat.

REFERENSI AKADEMIK

A. Buku dan Publikasi Ilmiah

1. Gini, Corrado. (1912). *Variabilità e Mutabilità*. Journal of the Royal Statistical Society.
2. Piketty, Thomas. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
3. Stiglitz, Joseph E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W.W. Norton & Company.
4. Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
5. Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2020). *Economic Development*. Pearson Education.

6. Kuznets, Simon. (1955). "Economic Growth and Income Inequality." *The American Economic Review*, Vol. 45, No. 1.
 7. Atkinson, Anthony B. (1970). "On the Measurement of Inequality." *Journal of Economic Theory*, Vol. 2, Issue 3.
 8. Deininger, Klaus & Squire, Lyn. (1996). "A New Data Set Measuring Income Inequality." *World Bank Economic Review*, 10(3).
-

B. Sumber Resmi Indonesia

9. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Indeks Gini dan Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia*. Jakarta.
 10. Bappenas. (2023). *Laporan Ketimpangan Ekonomi dan Sosial Nasional*.
 11. Bank Indonesia. (2023). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR)*.
 12. Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Kebijakan Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*.
 13. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Evaluasi Dana Desa dan Pemerataan Pembangunan*.
-

C. Laporan dan Database Internasional

14. World Bank. (2023). *World Development Indicators*.
15. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Human Development Report 2023: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today*.
16. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Income Inequality Update: The Gap Between Rich and Poor*.

17. IMF. (2023). *Fiscal Policy and Income Inequality: Lessons for Emerging Markets*.
 18. World Inequality Database (WID). (2024). *Global Inequality Report 2024*.
-

D. Artikel Jurnal dan Diskusi Kontekstual

19. Yusuf, Arief A. & Sumner, Andy. (2015). "Growth, Poverty, and Inequality Under Jokowi." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
 20. Hill, Hal. (2016). "Inequality in Indonesia: What Can We Learn from the Past?" *Asian Economic Policy Review*.
 21. Nugroho, Heru. (2022). "Digital Transformation and Income Inequality in Indonesia." *Journal of Development Policy Studies*.
 22. Tarumingkeng, Rudy C. (2025). *"The Moral Arc of Economic Equality — From Growth to Sustainability."* RudyCT Academic Series.
-

E. Referensi Reflektif dan Etis

23. Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
24. Sen, Amartya. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
25. Sachs, Jeffrey D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
26. Pope Francis. (2020). *Fratelli Tutti: On Fraternity and Social Friendship*. Vatican Press.
27. Stiglitz, Joseph E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W.W. Norton.

Catatan Penutup Reflektif

“Ketimpangan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi persoalan etika sosial dan moral bangsa.”

— Rudy C. Tarumingkeng (2025)

GINI Ratio mengajarkan bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang menambah angka pertumbuhan, tetapi memastikan **setiap manusia dihitung dan diperhitungkan**.

Keadilan sosial bukan hasil otomatis dari pasar, melainkan hasil kesadaran kolektif bahwa **pemerataan adalah bentuk tertinggi dari kemajuan**.

Copilot for this article - Chatgpt 5, Access date: 31 October 2025.

Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/6902d66c-04d4-8322-9825-893857181242>